
ARTICLE

Kajian terhadap Pelaksanaan Program Chse di Lokasi Wisata Bumi Kedaton Bandar Lampung Serta Implikasi dan Keberlanjutan Pascaprogram

Salma Hanifah Nurnastiti^{1*}, dan Novita Tresiana², Vina Karmilasari³

^{1,2,3} Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri. Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Nurnastiti, S.H., Tresiana, N., Karmilasari, V., (2025). Kajian terhadap Pelaksanaan Program Chse di Lokasi Wisata Bumi Kedaton Bandar Lampung Serta Implikasi dan Keberlanjutan Pascaprogram. *Administrativa* 7 (2)

Article History

Received: 15 Januari 2025
Accepted: 14 Mei 2025

Keywords:

Post-program
Implementation
CHSE Program
Tourism
Sustainability

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the CHSE program at the Bumi Kedaton tourist site in Bandar Lampung City, based on William N. Dunn's policy evaluation indicators. The research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, documentation, observation, and literature review. Informants were selected using purposive sampling with criteria directly related to the subject of the study. The findings reveal that the program was fairly effective in increasing the awareness of managers regarding the importance of cleanliness and safety during the pandemic; however, its implementation declined after certification. In terms of efficiency, the use of resources such as labor and time was optimal during the program, but limited funding hindered its sustainability. Regarding adequacy, the program provided sufficient support during the pandemic but did not fully meet the long-term needs of the managers due to the absence of continued assistance or encouragement from the government. In terms of equity, socialization efforts reached all stakeholders evenly, but implementation decreased and became less consistent after the pandemic subsided. The program was responsive to urgent needs during the pandemic but failed to address the managers' needs in maintaining post-pandemic standards due to a lack of updated strategies. Although the program's targets were appropriate, it lacked strategic planning to ensure ongoing implementation beyond the pandemic period.

Kata Kunci:

Implikasi Pascaprogram
Program CHSE
Pariwisata
Keberlanjutan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan CHSE pada lokasi wisata Bumi Kedaton kota Bandar Lampung berdasarkan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang berhubungan langsung dengan yang diteliti. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) efektivitas: program cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran pengelola akan pentingnya kebersihan dan keselamatan selama pandemi, namun penerapannya menurun pasca-sertifikasi; 2) efisiensi: penggunaan sumber daya seperti tenaga dan waktu sudah optimal saat program berlangsung, namun keterbatasan dana membuat keberlanjutan tidak tercapai; 3)

* Corresponding Author
Email :@.....

kecukupan: program cukup membantu saat pandemi namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan jangka panjang pengelola karena tidak ada dorongan atau bantuan lanjutan dari pemerintah; 4) perataan: sosialisasi sudah merata ke semua pihak, namun penerapannya menurun dan tidak merata setelah pandemi mereda; 5) responsivitas: program telah menjawab kebutuhan mendesak saat pandemi, namun kurang menjawab kebutuhan pengelola dalam mempertahankan standar pasca-pandemi karena tidak ada penyesuaian baru; 6) ketepatan: sasaran program sudah sesuai, tetapi tidak dilengkapi dengan strategi agar bisa terus diterapkan setelah pandemi berakhir.

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan penyebaran nilai-nilai sosial masyarakat. Dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengelolaan yang efektif dan bertanggung jawab, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Berdasarkan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyumbang devisa sebesar Rp280 triliun pada tahun 2019, meningkat dari Rp270 triliun pada tahun sebelumnya, dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 4,8% dan menyerap hingga 13 juta tenaga kerja. Pertumbuhan ini mencerminkan tren positif perkembangan pariwisata Indonesia di kawasan Asia Tenggara, sebagaimana tercermin dalam laporan *Global Economic Impact & Trends 2020* dari World Travel & Tourism Council yang mencatat pertumbuhan PDB sektor pariwisata di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara sebesar 4,6%.

Pada periode 2017 hingga 2019, jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia meningkat dari 12,9 juta menjadi 15,5 juta, menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisatawan terbanyak keempat di ASEAN setelah Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kenaikan ini memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara dari sektor wisatawan mancanegara. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pendapatan Indonesia dari wisatawan asing mencapai 6,9 miliar dolar AS pada 2019 (Kemenparekraf, 2021), mempertegas pentingnya peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan yang terus berkembang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, sektor ini ditargetkan memberikan kontribusi strategis bagi transformasi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam peningkatan devisa dan nilai tambah ekonomi kreatif. Untuk mewujudkan target tersebut, dibutuhkan strategi dan inovasi pelaksanaan, terutama dalam menghadapi tantangan bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, penyakit menular akibat virus SARS-CoV-2 yang menyebar melalui droplet saluran pernapasan dan dapat menimbulkan gangguan ringan hingga berat, bahkan kematian. Pandemi ini menjadi titik balik bagi kebijakan dan model bisnis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendorong adaptasi terhadap tatanan kenormalan baru dengan mengedepankan aspek kebersihan, keselamatan, keamanan, kelestarian lingkungan, serta penerapan protokol kesehatan. Menyikapi krisis ini, Kemenparekraf pada tahun 2020 menyusun berbagai strategi untuk menyelamatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021, kunjungan wisatawan pada Januari 2020 mencapai 1,272 juta—tertinggi dalam tiga tahun terakhir untuk bulan tersebut—namun mulai menurun pada Februari dan mencapai titik terendah pada April dengan hanya

160 ribu kunjungan. Sepanjang 2020, total wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia hanya mencapai 4,052 juta atau sekitar 25% dari total tahun sebelumnya. Dampak dari kondisi ini sangat signifikan, menyebabkan 939 ribu pekerja mengalami pengurangan jam kerja dan 409 ribu lainnya kehilangan pekerjaan.

Gambar 1. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2019-2020
Sumber: (Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021)

Selama pandemi, Kemenparekraf membagi strategi penyelamatan sektor pariwisata ke dalam tiga tahap: tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Pada fase pemulihan, destinasi wisata domestik dibuka kembali secara bertahap dengan menerapkan protokol CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*) yang diatur dalam Permenparekraf No. 13 Tahun 2020. Program ini bertujuan memastikan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan melalui sertifikasi bagi pelaku usaha, fasilitas, dan destinasi wisata. Sertifikasi CHSE diharapkan meningkatkan rasa aman wisatawan dan menjadi langkah awal menuju pariwisata berkelanjutan yang mengutamakan kualitas layanan dan dampak positif bagi masyarakat lokal. Untuk memperkuatnya, CHSE ditetapkan sebagai standar nasional melalui SNI 9042:2021. Meski bersifat sukarela, sertifikasi ini menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan wisatawan dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Survei Kemenparekraf bersama Inventure dan Alvara (2021) menunjukkan bahwa 82% responden memilih akomodasi bersertifikat CHSE, menandakan pentingnya standar ini dalam keputusan wisatawan. Hingga 2024, tercatat 11.893 pelaku usaha pariwisata telah tersertifikasi CHSE. Di sisi lain, Kota Bandar Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata dengan ragam destinasi—alam, budaya, sejarah, kuliner, religi, MICE, dan buatan—yang didukung akses mudah melalui tol Trans Sumatera serta fasilitas penunjang seperti hotel dan bandara. Menurut LAKIP Dinas Pariwisata (2024), kunjungan wisatawan mencapai 1.086.711 pada 2019, namun menurun menjadi 821.259 pada 2020 akibat pandemi, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan gangguan operasional sektor pariwisata.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan di Kota Bandar Lampung didapat dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, kunjungan wisatawan mulai mengalami peningkatan menjadi 854.084 kunjungan wisatawan. Tren pemulihan ini berlanjut di tahun 2022 hingga tahun 2024, dengan jumlah kunjungan yang kembali naik dari 1.730.095 kunjungan sampai 2.324.756 kunjungan wisatawan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pulihnya kepercayaan publik terhadap sektor pariwisata serta pentingnya kualitas layanan dan jaminan keamanan dalam destinasi wisata. Untuk mendukung pemulihan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pariwisata telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sesuai arahan RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026 yang memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pariwisata daerah.

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pariwisata daerah. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, dinas pariwisata mengeluarkan berbagai kegiatan yang mengacu pada program strategis yang telah dibuat sesuai dengan arahan RPJMD 2021-2026 yaitu program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satu kegiatan yang dijalankan adalah penerapan program CHSE di Kota Bandar Lampung. Destinasi wisata di

Kota Bandar Lampung yang telah mendapatkan sertifikasi CHSE adalah Wisata Bumi Kedaton. Wisata Bumi Kedaton merupakan destinasi wisata yang terletak di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung yang didirikan pada 20 Oktober 2004 dengan luas area 15 hektar. Tempat wisata ini dibangun karena daerah Batu Putu memiliki pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk. Selain itu, lokasi ini berada di kawasan perbukitan dengan tanah yang subur dan memiliki aliran sungai, sehingga menjadi kawasan potensial untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata kota. Konsep dari pembuatan Wisata Bumi Kedaton terdiri dari gabungan konsep waterpark, taman keluarga dan taman satwa mini.

Wisata Bumi Kedaton, yang dibangun sejak 2004, sempat tutup pada 2015–2019 dan dibuka kembali pada 2020, tepat saat pandemi Covid-19 merebak. Baru beroperasi, tempat ini kembali ditutup sementara akibat PSBB. Setelah pelonggaran kebijakan, destinasi ini dibuka kembali pada Juni 2020 dengan menerapkan protokol CHSE dan menata ulang kawasan wisata, melibatkan 20 pekerja lokal sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat terdampak pandemi. Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, pengelola mengikuti program CHSE dan berhasil memperoleh sertifikasi pada 2020–2021. Namun, sertifikasi tidak diperpanjang menjadi SNI CHSE pada 2022 karena keterbatasan dana, yang menjadi pertimbangan utama selama masa pemulihan pariwisata.

Berdasarkan observasi peneliti, penerapan aspek kesehatan CHSE mulai menurun, seperti penggunaan masker dan jaga jarak yang tidak lagi dipatuhi, seiring dengan pelonggaran PSBB dan keberhasilan vaksinasi. Hasil wawancara memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa penurunan risiko penyebaran Covid-19 membuat protokol kesehatan dianggap tidak lagi mendesak. Pengelola pun mengalihkan fokus ke pemulihan kunjungan dan keberlangsungan operasional dibanding memperbarui sertifikasi. Meski begitu, sebagian standar CHSE tetap diterapkan. Perubahan regulasi nasional, termasuk dicabutnya status darurat pandemi, turut memengaruhi persepsi pengelola dan wisatawan terhadap keberlanjutan CHSE, sehingga muncul tantangan dalam mempertahankan kesadaran akan pentingnya standar kesehatan dan keselamatan. Ketidakberlanjutan ini tidak hanya dipengaruhi oleh teknis dan dana, tetapi juga oleh perubahan sosial dan regulatif yang berdampak pada perilaku pelaku wisata. Oleh sebab itu, penting dilakukan analisis terhadap efektivitas dan dampak program CHSE serta potensi keberlanjutannya dalam kerangka kebijakan pariwisata berkelanjutan. Permasalahan ini relevan untuk diteliti karena menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang mendorong pariwisata berstandar keberlanjutan dengan kenyataan di lapangan. Evaluasi kebijakan dibutuhkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaannya efektif serta untuk mengidentifikasi hambatan dalam pencapaiannya. Maka, penelitian ini difokuskan pada evaluasi penerapan CHSE di Wisata Bumi Kedaton Bandar Lampung menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang meliputi enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Dalam ilmu administrasi publik, konsep kebijakan publik mulai berkembang sekitartahun 1970-an (Anggara, 2014). Secara umum kebijakan bertujuan untuk memilah dan menunjukkan pilihan terpenting dalam mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan publik diartikan sebagai salah satu tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka menjalankan tugas-tugaspemerintahannya dalam

bentuk pengaturan maupun keputusan. Padapraktiknya, kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam sistem pemerintahan negara, didalamnya terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara dan tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi. Fokus utama kebijakan publik adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagai teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Salah satu tujuan studi kebijakan publik untuk menganalisis tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik sehingga terwujud suatu kebijakan publik tertentu. Tahapan demi tahapan tersebut terangkum sebagai proses siklus pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan metode yang lebih terperinci lagi. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat kebijakan publik (Anggara, 2014).

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik menjelaskan bahwa sebuah kebijakan publik tidak bisadilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan dikenal sebagai evaluasi kebijakan. Makna evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dan tujuan yang telah dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut William N. Dunn(2003) secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Secara spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai manfaat atau nilai hasil kebijakan. Untuk memastikan fungsi evaluasi dapat terealisasi, dibutuhkan tolak ukur atau kriteria penilaian keberhasilan/kegagalan suatu kebijakan. Salah satu model evaluasi kebijakan yang digunakan dalam studi administrasi publik adalah model evaluasi menurut William N. Dunn (2003) dengan memberikan kriteria evaluasi kebijakan menggunakan beberapa indikator:

1. Efektivitas, digunakan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan mencapaitujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menilai tingkat keberhasilanprogram dalam menghasilkan dampak yang diinginkan.
2. Efisiensi, digunakan untuk melihat perbandingan antara hasil yang dicapai dengansumber daya yang digunakan. Dapat dikatakan efisien apabila mampu mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.
3. Kecukupan, digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan mampumenyelesaikan permasalahan secara menyeluruh dengan pemberian solusi yang digunakan.
4. Perataan, digunakan untuk mengetahui hasil dari suatu kebijakan dapat didistribusikan dan dirasakan tujuannya secara adil dan merata kepada seluruh kelompok sasaran kebijakan.
5. Responsivitas, digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah kebijakan mampu menjawab kebutuhan, aspirasi, dan tuntutan masyarakat yang berarti selarasdengan harapan publik dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika social yang berkembang.
6. Ketepatan, digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan yang diambil dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan dengan dasar pertimbangan yang logis, relevan, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability)

CHSE adalah program Kemenparekraf yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid 2019 yang bertujuan untuk memastikan penerapan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di sektor pariwisata selama masa pandemi Covid-19 di era kornomalan baru. Aturan program CHSE tentunya mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 (Kemenparekraf, 2022).

SNI CHSE

SNI 9042:2021 Tentang Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan merupakan standar baru yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf bersama BSN menjadi acuan bagi tempat pengelolaan penyelenggaraan dan mendukung kegiatan pariwisata dalam memenuhi persyaratan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. SNI CHSE diluncurkan untuk menjamin konsistensi penerapan sertifikasi CHSE yang sejak tahun 2020 menjadi program Kemenparekraf sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan dalam berwisata dengan sehat, aman dan nyaman.

Sertifikasi SNI CHSE bersifat sukarela, namun menjadi piranti penting yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap penerapan CHSE (Kemenparekraf, 2022). Program SNI CHSE menetapkan persyaratan bagi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata sebagai berikut:

1. Daya tarik wisata.
2. Fasilitas pariwisata yaitu rumah makan, hotel, pondok wisata, tempat pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, lapangan golf, spa, taman rekreasi dan arena permainan.
3. Kawasan pariwisata.
4. Destinasi pariwisata.

Sementara untuk tempat pendukung kegiatan pariwisata terdiri dari:

1. Pusat informasi pariwisata.
2. Tempat penjualan cinderamata dan oleh-oleh.

Penilaian kesesuaian SNI CHSE dilakukan melalui kegiatan sertifikasi yang berpedoman pada SNI ISO/IEC 17065 tentang penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa dengan ruang lingkup SNI 9042 tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan melalui proses audit dan inspeksi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Informasi mengenai LSUP yang terakreditasi dapat diakses di website chse.kemenparekraf.go.id. Kegiatan sertifikasi pada SNI CHSE dilakukan melalui proses audit dan inspeksi yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

C. METODE

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka pada penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan dan

mendeskripsikan terkait evaluasi penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung: kajian dampak dan keberlanjutan pasca program. Kemudian peneliti ingin menganalisis informasi atau data yang dikelompokkan sesuai dengan 6 (enam) indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn untuk menarik kesimpulan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) yaitu:

1. Efektivitas, yaitu sejauh mana tujuan dari program CHSE dapat tercapai di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.
2. Efisiensi, yaitu melihat perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumberdaya yang digunakan selama penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.
3. Kecukupan, yaitu melihat hasil penerapan program CHSE mampu menjawab kebutuhan saat pandemi dalam menjamin kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.
4. Perataan, yaitu mengetahui manfaat dari penerapan program CHSE dapat dirasakan secara merata kepada kelompok sasaran kebijakan yaitu Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.
5. Responsivitas, yaitu mengetahui tanggapan kelompok sasaran kebijakan yaitu Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung terkait program CHSE.
6. Ketepatan, yaitu mengkaji sejauh mana program CHSE mampu merespon kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan kebijakan yaitu Wisata Bumi Kedaton.

Selain itu, fokus penelitian juga mencakup aspek keberlanjutan pasca program seperti tidak dilanjutkannya sertifikasi CHSE menjadi SNI CHSE di Wisata Bumi Kedaton. Evaluasi penting untuk melihat dampak jangka panjang dari program serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga standar pelayanan wisata tanpa keberlanjutan sertifikasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara
Wawancara digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data utama dengan pendekatan semi terstruktur untuk menggali informasi mendalam mengenai penerapan, kendala, dan dampak program CHSE. Teknik ini sesuai untuk studi pendahuluan dengan jumlah responden terbatas, dan memungkinkan peneliti memperoleh data terbuka berdasarkan pendapat informan (Sugiyono, 2013). Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan relevan terhadap topik penelitian. Narasumber utama terdiri dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan Pengelola Wisata Bumi Kedaton, yang diwawancarai secara langsung untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam.
2. Observasi
Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa “through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”. Dalam Bahasa Indonesia berarti melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Sesuai yang dikatakan oleh Nasution bahwa observasi merupakan sebuah dasar ilmu pengetahuan serta fakta yang digunakan untuk memperoleh data penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan yang berupa informasi melalui penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung dalam penelitian, misalnya gambaran lokasi penelitian dan struktur organisasi dan visi misi serta sejarah dari yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh kajian pustaka yang mendukung dalam penyusunan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini berarti, mengumpulkan data berupa dokumen atau laporan yang menunjang penelitian yang berkaitan dengan program CHSE.

4. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dan sumber informasi dari bacaan berupa literatur, buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian yang mendukung dan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan penelitian yang dilakukan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Model ini menyatakan beberapa langkah dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan dalam merangkum, menentukan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan pokok pembahasan (Sugiyono, 2013). Sehingga dengan melakukan reduksi data, dapat mempermudah peneliti dalam menemukan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pokok penelitian serta mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013) menjelaskan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text” yang berarti, penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dalam hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menurut Sugiyono (2013), kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah awal, namun sifatnya masih sementara dan dapat berkembang selama proses di lapangan. Jika kesimpulan awal didukung oleh data valid dan konsisten saat pengumpulan data lanjutan, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel. Oleh karena itu, peneliti harus menyertakan bukti yang kuat agar kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik, menurut William N. Dunn (2003) evaluasi merupakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah dengan mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan. Dalam hasil penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan evaluasi *ex post*, yaitu menilai pelaksanaan kebijakan setelah program selesai diterapkan. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah berakhir masih memberikan dampak atau tidak bagi keberlangsungan pengelolaan destinasi. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yang menilai kebijakan menggunakan 6 (enam) indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pembahasan ini menguraikan sejauh mana indikator tersebut

tercapai berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara informan, dokumentasi serta observasi langsung.

Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan suatu program atau kebijakan dapat tercapai. Dalam program CHSE di Wisata Bumi Kedaton, sasaran utamanya adalah menjamin kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan bagi wisatawan selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil memenuhi sebagian besar tujuan jangka pendek, terutama dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang memadai. Pengelola mengikuti arahan teknis dari Sucofindo dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dengan menyediakan sarana cuci tangan, pemeriksaan suhu, penanda jaga jarak, serta fasilitas sesuai indikator CHSE. Langkah-langkah ini menciptakan lingkungan wisata yang aman dan meningkatkan kepercayaan pengunjung di tengah kekhawatiran terhadap penyebaran virus. Temuan ini sejalan dengan Hasmiati (2021) dalam penelitiannya mengenai efektivitas penerapan CHSE di Hotel Golden Tulip Tangerang, yang menekankan pentingnya pendampingan aktif dan evaluasi rutin. Keberhasilan di Wisata Bumi Kedaton juga didukung oleh keterlibatan Sucofindo dan Dinas Pariwisata sebagai pihak yang memberikan bimbingan teknis dan pengawasan. Namun, setelah masa sertifikasi berakhir, penerapan protokol tidak berlanjut secara menyeluruh—fasilitas tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya, SOP tidak dijalankan, dan tenaga kerja tidak lagi dibekali arahan, sehingga efektivitas program tidak berlanjut dalam jangka panjang. Hal ini menegaskan bahwa pencapaian awal tidak menjamin keberlanjutan tanpa dukungan sistematis. Selain itu, hasil ini selaras dengan Wulandari & Septian (2025) dalam evaluasi sertifikasi CHSE di Desa Wisata Kabupaten Sleman, yang menunjukkan adanya kekhawatiran dari pengelola terhadap biaya perpanjangan sertifikasi dan kerumitan proses asesmen, yang dianggap memakan waktu dan sumber daya, sehingga menghambat efektivitas program dalam jangka panjang.

Efisiensi

Efisiensi mengukur sejauh mana hasil optimal dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks program CHSE di Wisata Bumi Kedaton, efisiensi terlihat dari pengelolaan anggaran, tenaga kerja, waktu, dan sumber daya lain yang dilakukan dengan baik, terutama karena proses sertifikasi difasilitasi pemerintah tanpa membebani pengelola secara finansial. Pendampingan dari Sucofindo dan pelatihan pegawai juga diberikan gratis, sementara pengelola hanya perlu menyiapkan waktu, tenaga, dan fasilitas sesuai standar CHSE. Sebagai bentuk adaptasi pasca pandemi dan pembatasan jumlah pengunjung, pengelola menerapkan efisiensi operasional dengan membuka wahana waterpark hanya pada hari Kamis hingga Minggu. Namun, setelah dukungan pemerintah berakhir dan pengelola tidak memperpanjang sertifikasi, efisiensi jangka panjang menurun akibat ketiadaan sistem internal yang menjamin keberlanjutan program. Meskipun demikian, efisiensi tetap dijalankan dalam pengelolaan energi wahana air melalui pengaturan waktu operasional untuk menghemat listrik, air, dan tenaga kerja tanpa menurunkan kualitas layanan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa efisiensi masih dipertahankan, meski tidak lagi berfokus pada standar CHSE, melainkan lebih bersifat adaptif terhadap kondisi ekonomi. Oleh karena itu, efisiensi program CHSE di Wisata Bumi Kedaton hanya bertahan selama adanya dukungan pemerintah dan belum menjadi bagian dari sistem manajemen jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maharani (2024) di Villa Kemarang Banyuwangi yang menunjukkan efisiensi dalam penghematan dan pengelolaan air sebagai bagian dari implementasi CHSE, yang serupa dengan upaya pengendalian biaya operasional

tanpa mengurangi kualitas layanan di Wisata Bumi Kedaton, menandakan bahwa efisiensi juga mencakup kemampuan adaptif dalam pengelolaan sumber daya secara rasional.

Kecukupan

Kecukupan mengacu pada sejauh mana program mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang menjadi sasaran. Dalam konteks program CHSE di Wisata Bumi Kedaton, meskipun kebutuhan dasar seperti jaminan kebersihan dan keselamatan wisatawan telah terpenuhi melalui sertifikasi dan penerapan protokol kesehatan, program ini belum menjangkau kebutuhan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal, program CHSE cukup memadai dengan adanya pelatihan, pendampingan teknis dari Sucofindo, serta sosialisasi informasi baik secara langsung maupun melalui papan informasi di area wisata. Hal ini mencerminkan komitmen awal dalam menjawab kebutuhan selama pandemi. Penelitian ini sejalan dengan temuan Hasmiati (2021) dalam studi tentang Hotel Golden Tulip Tangerang, yang menunjukkan bahwa program CHSE digunakan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas layanan, namun kecukupan tidak akan bertahan tanpa pemantauan berkala dan komitmen berkelanjutan. Di Wisata Bumi Kedaton, berakhirnya masa sertifikasi tidak diikuti dengan upaya pembaruan atau perawatan standar, tidak ada insentif yang mendorong perpanjangan sertifikasi, dan tidak dilakukan evaluasi rutin terhadap protokol yang telah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan hanya berlangsung pada masa tanggap darurat pandemi, tanpa mekanisme internal yang menjamin keberlanjutan. Oleh karena itu, program CHSE di Wisata Bumi Kedaton dinilai belum cukup untuk mendorong transformasi destinasi wisata menuju standar berkelanjutan dalam jangka panjang.

Perataan

Perataan merujuk pada sejauh mana program memberikan manfaat yang adil kepada seluruh kelompok sasaran, baik pelaku usaha maupun wisatawan. Dalam pelaksanaan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal, program cukup berhasil menjangkau kelompok internal seperti manajemen dan staf, yang terlibat langsung dalam pelatihan, pengawasan protokol, dan penyediaan fasilitas sesuai standar. Seluruh unit wisata semula menerapkan layanan seragam seperti tempat cuci tangan dan imbauan penggunaan masker. Namun, dari sisi pengunjung dan masyarakat sekitar, manfaat program belum dirasakan secara merata. Pengawasan terhadap kepatuhan pengunjung tidak konsisten di semua area; area pintu masuk lebih terkontrol dibandingkan bagian dalam. Setelah masa program berakhir, ketimpangan semakin tampak dengan berhentinya praktik protokol secara menyeluruh, seperti hilangnya fasilitas cuci tangan dan kurangnya peran pegawai dalam mengingatkan protokol. Ketergantungan pada skema program formal tanpa menginternalisasi standar CHSE sebagai budaya kerja menyebabkan distribusi manfaat tidak merata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perataan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton belum optimal, karena lebih banyak dirasakan pihak internal daripada pengunjung umum. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wulandari & Septian (2025) yang menyatakan bahwa program CHSE belum dirasakan secara merata, seperti pada desa-desa wisata di Yogyakarta yang mengalami kendala dalam proses sertifikasi akibat keterbatasan kuota dan panjangnya antrian pendaftaran.

Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana suatu program mampu memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Dalam konteks program CHSE di Wisata Bumi Kedaton, responsivitas tercermin dari bagaimana pengelola menanggapi kebutuhan

pengunjung akan rasa aman dan nyaman saat pandemi. Berdasarkan hasil wawancara, pengelola menunjukkan respons positif pada awal pelaksanaan program, seperti mengikuti sertifikasi, menyediakan fasilitas protokol kesehatan, dan melibatkan staf dalam pelatihan yang difasilitasi Sucofindo. Program ini dianggap sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap sektor pariwisata yang terdampak pandemi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ananti & Asyarief (2023), yang menunjukkan bahwa sertifikasi CHSE meningkatkan kepercayaan wisatawan, dengan 92,76% responden di Candi Borobudur menilai sertifikasi ini sesuai harapan, dan 51% menganggapnya sangat penting dalam keputusan berkunjung. Namun, responsivitas di Wisata Bumi Kedaton tidak berlanjut setelah masa sertifikasi berakhir. Sertifikat CHSE tidak diperbarui menjadi SNI CHSE, fasilitas protokol kesehatan tidak lagi dipelihara dengan baik, dan kesadaran staf untuk menegakkan protokol menurun. Bahkan, pengelola belum menanggapi tren wisata baru pasca pandemi seperti wisata berbasis kesehatan. Efisiensi operasional yang diterapkan, seperti pembatasan hari operasional wahana air, lebih menunjukkan adaptasi ekonomi daripada komitmen terhadap kelanjutan standar CHSE. Dengan demikian, responsivitas pengelola terhadap program CHSE tergolong baik hanya pada tahap awal, namun tidak diintegrasikan sebagai bagian dari budaya kerja jangka panjang, melainkan sekadar respons sementara terhadap situasi krisis.

Ketepatan

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan mengukur sejauh mana program menysasar pihak yang membutuhkan sesuai tujuan kebijakan. Dalam konteks CHSE di Wisata Bumi Kedaton, program ini dinilai tepat sasaran pada awal pelaksanaannya. Sebagai tempat wisata yang baru kembali beroperasi sejak 2020, Bumi Kedaton memang membutuhkan dukungan. Program CHSE memberikan pelatihan, pendampingan teknis, serta arahan yang membantu pengelola menyusun standar layanan dan membangun kepercayaan pengunjung. Penelitian ini sejalan dengan temuan Prakoso (2023) yang menunjukkan bahwa CHSE, E-WOM, dan kepercayaan saling berpengaruh terhadap niat konsumen memesan hotel, dan bahwa CHSE mampu meningkatkan kepercayaan serta menjadi standar penyelenggaraan jasa pariwisata. Namun dalam jangka panjang, ketepatan program menurun. Tidak ada mekanisme pemantauan, kewajiban pembaruan sertifikat, maupun integrasi standar CHSE secara berkelanjutan dalam operasional wisata. Pengelola pun belum mampu mempertahankan fasilitas dan membangun kesadaran pengunjung pasca program berakhir. Dengan demikian, meski CHSE tepat sasaran di awal, ketepatannya menurun karena program tidak dirancang untuk bertahan secara mandiri. Tanpa regulasi dan pendampingan lanjutan, CHSE tidak tertanam dalam budaya kerja jangka panjang Wisata Bumi Kedaton.

Kendala dalam Keberlanjutan Penerapan Program CHSE di Wisata Bumi Kedaton

Dalam keberlanjutan penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

1. Keterbatasan anggaran

Setelah sertifikasi CHSE selesai, pihak pengelola mengaku tidak memiliki cukup dana untuk melanjutkan proses sertifikasi ke tahap SNI. Mereka merasa adanya bebandalam pembiayaan apalagi dari program SNI CHSE itu sendiri sifatnya sukarela.

2. Kurangnya pendampingan lanjutan

Pada awal program, pengelola mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dari pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dan lembaga sertifikasi. Namun, setelah sertifikat CHSE diberikan, tidak ada lagi pendampingan, evaluasi, atau pelatihan

lanjutan. Hal ini membuat pengelola merasa seperti “dibiarkan sendiri” dalam mempertahankan standar CHSE.

3. Tidak Ada Insentif atau Dukungan Tambahan

Tidak ada bentuk insentif seperti bantuan promosi, subsidi, atau fasilitas lainnya yang bisa mendorong mereka untuk tetap menerapkan standar CHSE secara mandiri.

4. Pemahaman Tentang Keberlanjutan Program Masih Terbatas

Pada awalnya, pihak pengelola memahami dengan cukup baik tentang pentingnya program CHSE, terutama saat masa pandemi. Namun, setelah masa sertifikasi berakhir, tidak ada tindak lanjut berupa pemahaman bahwa standar CHSE seharusnya diterapkan secara berkelanjutan, bukan hanya saat pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan awal tentang program sudah ada, kesadaran untuk menjadikan CHSE sebagai bagian dari sistem manajemen jangka panjang masih kurang berkembang.

5. Tidak Dianggap Sebagai Kebutuhan Mendesak

Karena pandemi sudah mulai mereda, pihak pengelola merasa bahwa standar CHSE tidak lagi menjadi hal yang mendesak untuk dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang keberlanjutan program belum tertanam kuat, dan belum ada pandangan bahwa CHSE bisa menjadi bagian dari pelayanan jangka panjang, bukan hanya saat pandemi. Kendala-kendala tersebut menjadi penyebab mengapa sertifikasi CHSE di Wisata Bumi Kedaton tidak dilanjutkan menjadi SNI. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya di awal, tetapi juga pada dukungan dan keberlanjutan dari berbagai pihak setelah program berjalan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton berjalan cukup baik pada awal penerapan. Pengelola telah mengikuti proses sertifikasi dan menerapkan standar yang ditetapkan selama masa pandemi Covid-19. Namun, setelah program selesai dan sertifikat tidak lagi diperpanjang, upaya keberlanjutan program menjadi tidak optimal. Dari teori evaluasi kebijakan public menurut William N. Dunn (2003), dapat disimpulkan:

1. Efektivitas: Program cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran pengelola akan pentingnya kebersihan dan keselamatan selama pandemi, namun penerapannya menurun pasca-sertifikasi.
2. Efisiensi: Penggunaan sumber daya seperti tenaga dan waktu sudah optimal saat program berlangsung, namun keterbatasan dana membuat keberlanjutan tidak tercapai.
3. Kecukupan: Program cukup membantu saat pandemi namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan jangka panjang pengelola karena tidak ada dorongan atau bantuan lanjutan dari pemerintah.
4. Perataan: Sosialisasi sudah merata ke semua pihak, namun penerapannya menurun dan tidak merata setelah pandemi mereda.
5. Responsivitas: Program telah menjawab kebutuhan mendesak saat pandemi, namun kurang menjawab kebutuhan pengelola dalam mempertahankan standar pasca-pandemi karena tidak ada penyesuaian baru.
6. Ketepatan: sasaran program sudah sesuai, tetapi tidak dilengkapi dengan strategi agar bisa terus diterapkan setelah pandemi berakhir.

Secara keseluruhan program CHSE bermanfaat di awal, tapi tidak secara berkelanjutan. Penyebabnya adalah minimnya dukungan setelah sertifikasi, keterbatasan anggaran pengelola dan kurangnya kesadaran bahwa standar CHSE seharusnya tetap dijalankan meskipun pandemi sudah mereda. Program CHSE perlu ditindaklanjuti agar bisa menjadi bagian dari pengelolaan wisata secara berkelanjutan.

Saran

1. Bagi Pihak Pengelola Wisata Bumi Kedaton sebaiknya tetap menjaga penerapan standar CHSE dengan cara merawat fasilitas dan melakukan evaluasi rutin.
2. Bagi Pihak Dinas Pariwisata sebaiknya memberikan pendampingan dan pengawasan pasca-sertifikasi CHSE dan membentuk program pembinaan berkelanjutan agar penerapan standar tetap terjaga.
3. Bagi Pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebaiknya menyusun strategi lanjutan agar program CHSE bisa terus berkelanjutan secara nasional. Strategi ini bisa meliputi penguatan aturan hukum dan dukungan regulasi yang relevan agar pelaku usaha mau menjalankan standar CHSE kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kemendikbud. (2020). *Rencana Strategis 2020-2024 Kemendikbud/Baparekraf*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2021). *Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2021). *Siaran Pers : Mendikbud Harap SNI CHSE Jadi Standar Utama dalam Pelayanan di Sektor Parekraf*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2022). *Buku Tren Pariwisata 2022-2023*. Jakarta: Kemendikbud.
- Lampung, D. P. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Kota Bandar Lampung: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.
- Lampung, D. P. (2021). *Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026*. Kota Bandar Lampung: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.
- Lampung, D. P. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung*. Kota Bandar Lampung: Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Jurnal:

- Ananti, D. D., & Asyarief, E. R. (2023). Analisis Kepuasan Pengunjung Terhadap Daya Tarik Wisata Tersertifikasi CHSE (Studi Kasus: Candi Borobudur). *Kepariwisataan Jurnal Ilmiah*, 182-191.
- Hasmiati. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan Chse (Cleanliness, Health, Safety

And Environmental Sustainability) Sebagai Tatanan Pariwisata New Normal Di Indonesia (Studi Pada Hotel Golden Tulip Essential Tangerang). repository.ub.ac.id, 1-166.

Kemenparekraf. (2022). *CHSE Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Diambil kembali dari *CHSE Kementerian*: <https://chse.kemenparekraf.go.id/id/bantuan>

Kemenparekraf. (2022, Oktober 18). *Siaran Pers: Kemenparekraf Fasilitasi 800 Pelaku Parekraf Dapatkan Sertifikasi SNI CHSE pada 2022*. Diambil kembali dari Kementerian Pariwisata: <https://kemenpar.go.id/hasil-pencarian/siaranpers-kemenparekraf-fasilitasi-800-pelaku-parekraf-dapatkan-sertifikasi-snichse-pada-2022>

Maharani, I. (2024). Implementasi Keberlanjutan Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability (CHSE) Pada Villa Kemarang Banyuwangi. *Jurnal Hospitality dan Pariwisata*, 7-15.

Prakoso, A. (2023). Penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, And Environment Sustainability), E- WOM, Dan Kepercayaan Terhadap Niat Pemesanan Hotel Berbintang Di Lampung. digilib.unila.ac.id, 1-109.

Wulandari, S., & Septian, E. (2025). Evaluasi Program Sertifikasi CHSE Desa Wisata Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 149-158.

Sumber Lainnya:

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid 2019.